

BAB III

BENTUK NETRALITAS POLITIK MUHAMMADIYAH PADA PILKADA KOTA YOGYAKARTA 2017

Muhammadiyah memang sangat dilematis dalam memberikan sikap jika dibenturkan dalam persoalan-persoalan politik, terutama disaat momentum-momentum pemilihan umum. Hal itu dikarenakan Muhammadiyah memiliki pedoman khittah yang telah disepakati bersama-sama, bahwa Muhammadiyah tidak boleh terlalu masuk didalam ruang-ruang politik, apalagi sampai berafiliasi dengan partai politik. Namun pedoman Khittah tersebut nyatanya kurang sesuai dengan kondisi saat dilapangan, Muhammadiyah yang selama ini dipandang sebagai organisasi Islam yang netral, akhirnya ikut terlibat aktif di dalam momentum-momentum politik seperti Pilkada.

Dengan persoalan-persoalan PDM dengan politik tersebut, maka dari itu, pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan sesuai penelitian yang dilakukan, yaitu tentang netralitas politik Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Penulis akan menguji sejauh mana Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta benar-benar menerapkan netralitasnya pada momentum Pilkada di Kota Yogyakarta 2017. Bab ini akan dimulai dengan pandangan-pandangan dari elit Muhammadiyah tentang netralitas yang diwujudkan Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Kemudian mengakar kepada aktivitas-aktivitas politik PDM dengan pembagian sub-sub judul, sampai pada pembahasan yang menyimpulkan apakah PDM netral atau tidak di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Membahas persoalan netralitas PDM Kota Yogyakarta di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, terdapat aspek yang sebenarnya dapat mengukur netralitas Muhammadiyah jika dihadapkan pada momentum politik praktis. Aspek tersebut adalah: *Pertama*, sikap tidak secara aktif mendukung salah satu kandidat. *Kedua*, tidak menjadi tim sukses salah satu kandidat. *Ketiga*, tidak memiliki kepentingan politik. Ketiga aspek ini yang dapat mengukur dan menguji netralitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam menghadapi momentum politik praktis seperti Pilkada Kota Yogyakarta 2017, dan mengetahui sejauh mana Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam menjaga netralitas yang selama ini menjadi pegangan dasar Muhammadiyah.

A. Sikap PDM Tidak Secara Aktif Mendukung Salah Satu Kandidat?

Ketua PP Muhammadiyah yaitu Busyro Muqoddas memberikan pernyataan tentang sikap yang harus diambil Muhammadiyah pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah harus tetap netral tetapi konstruktif, artinya Muhammadiyah tetap menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang hanya mengandalkan uang. Menurut Busyro masyarakat saat ini harus sadar dan menghindari politik uang jika menginginkan pemimpin yang berintegritas. Pilkada harus dikembalikan pada hakikatnya yaitu memilih pemimpin bukan pejabat. Kriteria yang menentukan seorang pemimpin adalah dilihat dari kapasitas dan integritasnya (Muhammadiyah Netral Tapi Konstruktif, 2016, <http://jogja.tribunnews.com>. 05/10/16).

Ketua PDM Kota Yogyakarta Akhid mendefinisikan bahwa netral itu memiliki dua sudut pandang, jika dilihat dari sisi sosial netral adalah tidak memihak, tetapi apabila dihadapkan dengan politik, netral itu bagaimana bisa mensikapi sesuatu dengan melihat sisi yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Karena politik merupakan siasat, jadi ketika netral diartikan sebagai sikap tidak memihak, maka hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan, dan hal tersebut jelas akan merugikan Muhammadiyah, terutama di PDM Kota Yogyakarta. Beliau mengatakan :

Politik pada dasarnya akan menghasilkan suatu produk, dan produk tersebut yang jelas akan berpengaruh pada kita, ketika kita tidak memiliki pilihan yang tepat, otomatis hal tersebut akan merugikan diri kita (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

PDM Kota Yogyakarta memang dituntut untuk memiliki pilihan yang tepat didalam menghadapi persoalan politik, dalam konteks ini adalah Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Pilihan tersebut jelas akan memberikan pengaruh bagi organisasi. Maka bahasa netral yang Akhid pakai jelas, yaitu harus mempunyai pandangan yang luas tentang sisi keuntungan yang bisa didapat untuk persyarikatan. seperti contoh, ketika disandingkan dengan dua hal yang baik, pasti salah satu hal tersebut ada yang lebih baik. Maka PDM Kota Yogyakarta akan memilih suatu hal yang lebih baik tersebut, dengan artian ketika PDM tidak memberikan arahan pilihan yang tepat bagi warganya, hal tersebut jelas tidak akan menguntungkan bagi peryarikatan, dan ketika PDM hanya membiarkan saja warganya untuk memilih tanpa memberikan arahan, perihal tersebut sama saja menjerumuskan. Beliau mengatakan :

Untuk bersikap netral, kita tidak perlu menjaga jarak terhadap calon, bila perlu menjaga kedekatan yang sama kepada calon, ketika kita buta politik maka akan berdampak pada Muhammadiyah itu sendiri, karena harapan Muhammadiyah produk yang dihasilkan dari pilihan Muhammadiyah bisa bermanfaat bagi persyarikatan (Wawancara Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Persoalan politik memang memberikan pengaruh yang kuat bagi PDM Kota Yogyakarta dalam menentukan sikap yang diambil. PDM juga perlu melihat unsur yang tepat didalam meletakkan pilihannya, baik bagi warga Muhammadiyah, maupun bagi seluruh jajaran pengurus dan PDM Kota Yogyakarta. Akhid mengatakan salah satu unsur penting didalam menentukan pilihan adalah harus melihat background atau latarbelakang dari calon yang bertarung pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. ketika latar belakang dirasa sesuai dengan Muhammadiyah, otomatis warga Muhammadiyah juga akan ikut berperan dalam memenangkan calon pilihan Muhammadiyah. Faktor latarbelakang tersebut sangat penting didalam melangkah menentukan pilihan, supaya produk yang dihasilkan melalui pilihan yang tepat, akan memberikan pengaruh kebaikan di PDM Kota Yogyakarta (Wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Pandangan politik antara PP Muhammadiyah dengan PDM Kota Yogyakarta memang berbeda. Untuk menjaga netralitasnya PP Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan yang membatasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menghadapi momentum Pilkada 2017. Beberapa batasan tersebut antara lain: *Pertama*, didalam masa kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak diperbolehkan menjadi kader partai;

Kedua, jika terdapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang mencalonkan diri untuk maju sebagai kandidat kepala daerah harus mundur dari kepengurusan; *Ketiga*, apabila terdapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang menjadi tim sukses harus nonaktif sementara dari kepengurusan (Wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Menurut Akhid hal tersebut sedikit merugikan PDM Kota Yogyakarta dalam bergerak dibidang politik, PDM juga tidak leluasa dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta nantinya, maka dari itu PDM Kota Yogyakarta tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pada momentum Pilkada Kota Yogyakarta 2017 sesuai dengan amanat yang terdapat didalam Musyawarah Daerah. Bagi PDM Kota Yogyakarta, apabila terdapat kader yang memiliki potensi yang baik di bidang politik, dan dikenal baik oleh masyarakat Kota Yogyakarta, PDM Kota Yogyakarta akan mendorong dan mendukung penuh kader tersebut untuk bisa masuk ke kancah politik yang dia inginkan, supaya bisa membawa nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh Muhammadiyah (Wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Seharusnya melihat sebuah konsep netralitas bukanlah sebuah bentuk jarak, melainkan suatu keterlibatan yang kemudian memberikan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, hubungan Islam dengan politik tidak akan mungkin bisa dipisahkan, karena keduanya akan selalu bersinggungan di dalam tatanan masyarakat. Akan tetapi, Islam harus pandai dalam menempatkan diri jika dihadapkan dengan politik, sehingga tetap berada pada

batasan-batasan, agar tidak menjadi alat politik apalagi menjadikan politik sebagai tujuan.

Konsep netralitas yang mengistilahkan “menjaga jarak yang sama” menurut Samik selaku Ketua LHKP PDM Kota Yogyakarta, merupakan anggapan bagi kader atau warga Muhammadiyah yang mengartikan politik adalah sebuah konsep yang hanya berhubungan dengan partai politik, padahal terdapat banyak komponen-komponen sosial yang dapat diperbaiki melalui politik itu sendiri. PDM Kota Yogyakarta dalam mengartikan dan menerapkan konsep netralitas politik yaitu dengan lebih menekankan kepada istilah “menjaga kedekatan yang sama”. Karena bagaimanapun Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan sosial tidak akan bisa lepas dari politik. Kemudian, konsep tersebut diterapkan pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, bahwa PDM Kota Yogyakarta tetap menjaga kedekatan yang sama untuk kepentingan kedepan bagi persyarikatan (Wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

PDM Kota Yogyakarta selalu mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dan menjaga sikap politiknya, supaya tidak terlalu frontal dan terkesan berpolitik praktis pada Pilkada Kota Yogyakarta, dan tidak menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan segelintir orang, melainkan menjadi kepentingan persyarikatan. Beliau dalam wawancaranya juga mengatakan:

Kondisi Pilkada 2017 lebih membutuhkan pemimpin yang islami untuk menggerakkan pemerintahan Kota Yogyakarta agar lebih baik lagi. Jadi, pada dasarnya netralitas PDM Kota Yogyakarta memiliki pengertian bahwa Muhammadiyah harus bisa berpihak pada kebutuhan dan

kemaslahatan persyarikatan, agar kedepan Muhammadiyah dapat berdakwah dan bergerak lebih maju dan berkembang (Wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

Muhammadiyah secara sikap formal tetap menjaga netralitas dalam berpolitik. Netralitas Muhammadiyah memaknai suatu keadaan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan atau berhimpitan dengan partai politik tertentu didalam agenda politik praktis seperti Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PDM Kota Yogyakarta sebenarnya hanya memperjuangkan dan memilih pemimpin yang satu visi dengan Muhammadiyah, karena hal tersebut berpengaruh penting terhadap keberlangsungan dakwah Muhammadiyah kedepan. Imam Bayu selaku Sekretaris Umum PCM Jetis mengatakan :

Memilihkan pemimpin untuk umat memang harus dilakukan secara transparan, bahkan muhammadiyah harus turun tangan dalam hal tersebut. jadi dalam hal ini tidak ada keterkaitan apakah Muhammadiyah netral atau tidak, tapi Muhammadiyah sedang memperjuangkan pemimpin untuk umat (wawancara, Imam Bayu 2018. 18/0318).

Dalam menerapkan neralitasnya Muhammadiyah juga selalu menyampaikan pada warga nya melalui rapat rutin satu bulan sekali, atau didalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah bukan Organisasi Politik. Dengan begitu Organisasi Muhammadiyah tetap bersikap netral, namun Muhammadiyah mempersilahkan kepada kader-kadernya dalam memilih pemimpin di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Kecuali pada pemilihan DPD, Muhammadiyah memang memberikan dukungan kepada salah satu calon, karena pemilihan DPD juga melibatkan Organisasi Masyarakat yang didalam nya memberikan dukungan. (wawancara, Himmatussudja'ah 2018. 09/04/18).

Konsep netralitas memang menjadi pengertian yang berbeda-beda diantara kader atau elit Muhammadiyah. Pengertian tersebut tentu untuk menentukan langkah Muhammadiyah dalam mengambil sikap soal politik. Disatu sisi ada yang mengartikan netralitas adalah suatu sikap bahwa Muhammadiyah tidak perlu mendekati diri dalam politik, disisi lain ada juga yang mengartikan bahwa netralitas adalah suatu bentuk keberpihakan Muhammadiyah untuk memiliki pilihan saat dihadapkan dengan persoalan politik. Pandangan konsep netral yang berbeda-beda sebenarnya memiliki maksud untuk menjaga citra Muhammadiyah yang selama ini dikenal netral dalam politik praktis.

Pandangan-pandangan mengenai netralitas politik oleh beberapa elit Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebenarnya mengarahkan kepada suatu bentuk keberpihakan. PDM Kota Yogyakarta tidak bisa memandang netralitas sebagai bentuk tidak melakukan apa-apa, atau diam saja didalam menghadapi kondisi seperti Pilkada Kota Yogyakarta. Netralitas adalah suatu bentuk pilihan, apakah Muhammadiyah mau memilih suatu hal yang buruk dibanding yang baik, jelas tidak mungkin. Maka jika diistilahkan “menjaga kedekatan yang sama” adalah suatu hal yang kurang tepat, melihat pengaruh Muhammadiyah yang juga kuat dalam memberikan kontribusi untuk bangsa.

Dengan munculnya keberpihakan dari PDM bukan berarti netralitas diartikan sebagai keterlibatan antara Muhammadiyah dengan Pilkada Kota Yogyakarta 2017, melainkan Muhammadiyah harus memiliki sikap yang berpihak terhadap nilai-nilai yang dipilih didalam proses Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Menurut Ashad selaku Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta

keberpihakan adalah suatu wujud yang memiliki nilai, dan Muhammadiyah harus memperjuangkan nilai tersebut demi kebaikan persyarikatan. Beliau juga mengatakan :

Islam tidak pernah mengajarkan tentang netralitas, tetapi Islam mengajarkan tentang nilai. Seperti istilah jika dihadapkan pada suatu pilihan yang kedua nya sama-sama buruk, kita harus memilih keburukan yang memiliki nilai minimal. Artinya PDM Kota Yogyakarta juga harus memiliki keberpihakan pada salah satu calon yang lebih baik dibandingkan calon yang lain (Wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Pada Kontestasi Pilkada Kota Yogyakarta 2017 PDM Kota Yogyakarta memang didorong untuk memilih sosok pemimpin yang tepat dalam memimpin Kota Yogyakarta kedepan. Beberapa calon yang maju untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta juga memperebutkan suara dari warga Muhammadiyah. Hal itu dilakukan karena Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Islam yang memiliki massa cukup besar dan berpengaruh di Kota Yogyakarta. Sebagai contohnya terdapat dibawah ini.

Kontestasi politik di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 juga memberikan warna dengan hadirnya gerakan independent yang mencalonkan Garin Nugroho dan Romy Harianto untuk menjadi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta. Romy Harianto yang merupakan kader aktif Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah juga mengharapkan dukungan dari PDM Kota Yogyakarta, meskipun akan bersaing ketat dengan bakal calon dari Partai PAN, Romy mengaku akan berusaha dan optimis mendapatkan dukungan dari warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta

(Dukungan Muhammadiyah Jadi Rebutan, 2016, <https://nasional.tempo.co>. 20/04/2016).

Rasa optimisme pasangan Bakal Calon dari independent tersebut muncul setelah mendapatkan dukungan dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Hal itu dibuktikan dengan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Busyro untuk mendukung Bakal Calon dari independent yaitu Garin dan Romy. Selain itu, Romy juga mengklaim mendapatkan banyak dukungan dari pengurus Muhammadiyah yang lainnya, karena keaktifannya di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta (Dukungan Muhammadiyah Jadi Rebutan, 2016, <https://nasional.tempo.co>. 20/04/2016).

Optimisme dari Bakal Calon yang maju lewat perseorangan atau independent itu nyatanya tidak mulus sesuai harapan, berdasarkan keputusan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta yang lolos menjadi Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah Imam Priyono dan Achmad Fadli yang didukung oleh PDIP, Nasdem, dan PKB serta Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi yang didukung oleh PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP.

Pada kondisi yang lain, calon yang diusung dari PDIP, Nasdem dan PKB yaitu Imam Priyono dan Achmad Fadli juga membidik dukungan dari Muhammadiyah, karena Organisasi Muhammadiyah memiliki peran penting di Kota Yogyakarta, serta memiliki massa yang cukup besar di Kota Yogyakarta, sehingga dapat membantu dari segi suara dan strategi dalam

memenangkan pasangan calon Imam Priyono dan Achmad Fadli (<http://jogjatv.tv> 02/03/16).

Calon petahana Walikota, Haryadi Suyuti juga mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah. Beliau bahkan menggandeng Heroe Poerwadi yang merupakan Ketua DPD PAN yang sekaligus kader Muhammadiyah. Namun, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta tidak ingin mengambil pusing atas klaim dukungan yang dimunculkan oleh beberapa calon yang maju di Pilkada Kota Yogyakarta. Ashad menjelaskan bahwa Muhammadiyah secara organisatoris atau kelembagaan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik atau figur tertentu. Ashad juga menjelaskan tentang sikap Busyro Muqoddas yang mendukung bakal calon independent merupakan sikap pribadi. Sikap Busyro menurut Ashad merupakan bentuk pengajaran demokrasi kepada masyarakat di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (Hanafi, <https://daerah.sindonews.com> 27/04/16).

Ashad menegaskan bahwa PDM Kota Yogyakarta hanya memberikan rambu-rambu untuk warga Muhammadiyah dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, salah satu poin didalam rambu-rambu tersebut adalah memilih calon Walikota yang memiliki kultur dengan Muhammadiyah. Ashad juga mengatakan bahwa sikap PDM Kota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 terdapat pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kota Yogyakarta (Hanafi, <https://daerah.sindonews.com> 27/04/16).

Pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 2016, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015-2020 menetapkan beberapa rekomendasi internal yang berhubungan dengan politik, rekomendasi tersebut terdapat pada nomor 16 tentang keterlibatan pada penyelenggaraan pemerintahan, bahwa untuk terjaganya iklim Islamiyah di Kota Yogyakarta maka Muhammadiyah harus terlibat aktif mendorong kader-kadernya yang potensial sesuai keahliannya melalui masjid dan jamaah yang dimiliki agar ikut berkiprah dalam pemerintahan di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota, melalui cara-cara yang makruf dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan tujuan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, 2016; 13-14).

Selain itu, terdapat juga pada nomor 19 tentang kepemimpinan Kota Yogyakarta, bahwa pada tahun 2017 akan diselenggarakan Pilkada Kota Yogyakarta, untuk itu Muhammadiyah Kota Yogyakarta harus mendorong warganya untuk menggunakan hak pilihnya dan menghimbau untuk memilih calon walikota yang beriman dan bertakwa, memiliki kapabilitas, mengutamakan kepentingan rakyat, berjiwa reformis, peduli pada persoalan lingkungan, serta memiliki kedekatan kultur dengan Muhammadiyah, sehingga bisa mendukung perjuangan dakwah Muhammadiyah. (Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, 2016; 13-14).

Dalam Keputusan Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 2016 yang tertulis diatas memastikan sikap Muhammadiyah pada Pilkada 2017 adalah berpihak kepada salah satu calon yang memiliki kedekatan kultur dengan Muhammadiyah. Rekomendasi tersebut terdapat pada nomor 19 rekomendasi internal. Ashad menjelaskan bahwa keberpihakan PDM Kota Yogyakarta kepada salah satu calon yaitu tetap mengikuti dasar dan rekomendasi dari keputusan Musyawarah Daerah yang telah disepakati bersama-sama. Dorongan untuk memilih calon yang memiliki kedekatan dengan Muhamamdiyah merupakan suatu nilai yang sedang diperjuangkan Persyarikatan kedepan. Untuk itu PDM memang perlu menghimbau kepada warganya agar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan mengarahkan untuk memilih calon yang memiliki kultur Muhammadiyah. Ashad juga mengatakan :

Bangsa ini memang sedang mengalami proses demokratisasi, dan PDM Kota Yogyakarta sedang berproses untuk memberikan kontribusi dalam sistem demokrasi itu. PDM Kota Yogyakarta juga senantiasa selalu memberikan pencerahan kepada warganya agar membangun sistem demokrasi ini untuk supaya lebih manusiawi lagi. Semua keberpihakan yang dilakukan PDM Kota Yogyakarta adalah proses pencerahan melalui kader-kadernya, untuk bisa mempunyai pilihan dalam kehidupan masing-masing (wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Hasil Musyawarah Daerah yang telah disepakati bersama-sama memang mengarahkan bahwa PDM beserta warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta harus memiliki keberpihakan didalam memilih pemimpin pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PDM Kota Yogyakarta bahkan tidak hanya melihat pada

skala politik di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, namun memiliki pandangan 5 tahunan mengenai politik, baik pada saat Pemilihan legislatif maupun Pemilihan Presiden 2019 (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

PDM memang sudah mempertimbangkan hal-hal yang perlu dilakukan di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 pada Musyawarah Pimpinan. Meskipun secara langsung tidak terlihat mendukung, atau tidak dibuktikan sikap secara resmi, Namun, warga atau kader Muhammadiyah sudah mengetahui arah pilihan yang harus diambil di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Pilihan PDM merupakan gagasan kedepan dalam menggerakkan roda Persyarikatan, untuk itu, PDM memang harus berpihak kepada pasangan calon yang dekat dengan Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah sendiri, dan Muhammadiyah harus selalu memberikan support kepada kadernya sendiri (wawancara, Sugeng Nugroho Hadi 2018. 06/04/18).

PDM secara struktural memang tidak terluau aktif terlibat didalam Pilkada Kota Jogja 2017, tetapi secara kultural terlibat dan mendukung salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon Haryadi-Heroe. Dukungan yang diberikan senantiasa selalu beriringan dengan kepentingan yang dibawa Muhammadiyah. Jadi, ketika pasangan calon yang didukung Muhammadiyah berhasil menduduki jabatan sebagai Walikota Yogyakarta 2017, dengan begitu pasangan calon bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Muhammadiyah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18).

Kemudian, kader-kader PDM Kota Yogyakarta juga pro-aktif didalam mendukung pasangan calon yang didukung Muhammadiyah, termasuk juga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kraton. Ketua PCM Kraton Muhsin mengatakan :

PCM Kraton selalu memberikan suatu wawasan kepada teman-teman dari Muhammadiyah agar supaya mengerti, mengapa Muhammadiyah harus bermain di Pilkada Kota Yogyakarta, dan mengapa Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Haryadi-Heroe, karena Muhammadiyah mengharapkan pemimpin yang amanah dan mampu berpihak kepada masyarakat jogja, dan berpihak kepada Muhammadiyah (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18).

PCM Kraton juga selalu berhati-hati didalam keterlibatannya mendukung pasangan calon Haryadi-Heroe. PCM juga menghindari kampanye-kampanye negatif dan kampanye-kampanye disuatu tempat yang tidak diperbolehkan seperti masjid dan lain-lain. Tetapi PCM kraton tetap bergerak didalam mendukung Haryadi Heroe dengan memberikan pendidikan politik kepada warga, melalui pendekatan-pendekatan sehari-hari, dan selalu menyelipkan kata yaitu “mampu memilih pemimpin yang cerdas” (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18).

Didalam memilih pemimpin Kota Yogyakarta, PDM memang berupaya untuk lebih berperan aktif didalamnya, berperan aktif disini dengan artian bahwa PDM harus mendukung salah satu pasangan kandidat di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Menurut Imam dukungan PDM adalah suatu bentuk bahwa PDM juga sedang memperjuangkan yang terbaik untuk warganya, dengan mengarahkan warga Muhammadiyah didalam memilih pemimpin yang sesuai

dengan tujuan Muhammadiyah yang berkultur dari Muhammadiyah. Jika PDM lepas tangan dalam Pilkada Kota Yogyakarta, artinya tidak ada nilai yang sedang diperjuangkan oleh PDM untuk umatnya, dan hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ciri khas Organisasi Muhammadiyah yang memiliki nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar (wawancara, Imam Bayu 2018. 18/0318).

PDM Kota Yogyakarta didalam mengarahkan warganya untuk memilih di Pilkada Kota Yogyakarta yaitu dengan cara memberikan interupsi melalui surat edaran ke setiap Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Setelah itu, masing-masing tingkatan Pimpinan di Muhammadiyah mulai dari ranting hingga daerah memiliki gerakan sendiri-sendiri dalam mengarahkan warga Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis melakukan gerakannya dengan cara dakwah, baik dalam pengajian maupun di acara-acara Masjid. Didalam dakwah tersebut PCM Jetis menjelaskan tentang bagaimana seharusnya warga Muhammadiyah memilih pemimpin, dan seperti apa sosok pemimpin yang harus dipilih oleh warga Muhammadiyah, yaitu pemimpin yang memiliki kedekatan kultur dengan Muhammadiyah. Agar kedepan Muhammadiyah Kota Yogyakarta mampu bersinergi dengan Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pilihan warga Muhammadiyah (wawancara, Imam Bayu 2018. 18/03/18).

Di tempat lain, PRM Gampingan, Wirobrajan lebih pada gerakan secara langsung, yaitu memberikan himbauan kepada warganya untuk memilih pasangan Haryadi-Heroe. Melalui Sugeng sebagai Ketua PRM Gampingan,

himbauan dilakukan menjelang mendekati hari pemilihan. Walaupun sebenarnya warga Muhammadiyah Gampingan sudah paham, akan tetapi Sugeng terus mengingatkan dan memberikan saran agar sama-sama bergerak disemua lini untuk mendukung Haryadi-Heroe. (wawancara, Sugeng Nugroho Hadi 2018. 06/04/18)

Kemudian di PRM Kadipaten Kulon, Kraton gerakan yang dilakukan adalah mendorong pada warga nya utuk memilih Haryadi-Heroe di Pilkada Kota Yogyakarta. Wachid mengatakan akan mendukung calon yang dekat dengan umat Islam dan Muhammadiyah. Meskipun tidak disertai sikap tertulis didalam mendukung, namun warga Muhammadiyah Kadipaten Kulon sudah memahami akan pilihan yang harus diambil pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Dengan metode yang diterapkan PDM yaitu mengundang Haryadi-Heroe disetiap pengajian-pengajian, hal tersebut secara tidak langsung sebagai arahan untuk memilih pasangan calon tersebut, dan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang di Kota Yogyakarta akan mengikuti pilihan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. (wawancara, Wachid Ahmadi 2018. 06/04/18)

Selain itu upaya yang lain juga ditunjukkan Ketua Pemuda Muhammadiyah (PM) Kota Yogyakarta dalam menghadapi Pilkada Kota Yogyakarta. Dengan situasi Pilkada yang diwarnai dengan sikap masyarakat yang memilih untuk golput. Pemuda Muhammadiyah Memiliki inisiatif membuat sebuah propaganda yang bertuliskan “memilih untuk tidak memilih adalah sebuah vatalisme”. Ghifari mengatakan Propaganda tersebut

bermaksud untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017. Propaganda tersebut juga mengandung makna bahwa ketika ingin memajukan Kota Yogyakarta yaitu harus didasari dengan keberanian untuk memilih calon yang sesuai dengan pilihan hati masyarakat itu sendiri (wawancara, Ghifari Yuristhiadi 2018. 09/03/18).

Khawatir dengan angka golput yang tinggi, PD Aisyah Kota Yogyakarta juga menghimbau kepada kader-kadernya untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, dan tetap memilih pemimpin yang cerdas agar terpilih pemimpin yang baik dan amanah. Him selaku Ketua PD Aisyah Kota Yogyakarta tidak terlalu mempersoalkan tentang keberpihakan yang dipilih oleh persyarikatan di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PD Aisyah Kota Yogyakarta lebih mengedepankan kerjasama dengan pemerintah kedepan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain. Agar tercipta sinergitas antara keduanya dan sama-sama bisa memajukan Kota Yogyakarta (wawancara, Himmatussudja'ah 2018. 09/04/18)

PDM Kota Yogyakarta sebenarnya selalu mendorong serta memfasilitasi kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke dunia politik, akan tetapi ketika terjun ke dunia politik, tujuan yang dibawa harus seirama dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Karena pada situasi politik tertentu terdapat banyak yang mengaku sebagai kader Muhammadiyah tetapi tidak mewujudkan pribadi Muhammadiyah yang semestinya, mereka biasanya hanya ingin mendapatkan dukungan dan suara dari Muhammadiyah saja dan PDM Kota Yogyakarta sangat menyayangkan hal tersebut. PDM Kota

Yogyakarta hanya akan memberikan dukungan yang benar-benar kader Muhammadiyah, secara akhlak, sifat dan sikap mencerminkan Muhammadiyah yang sebenarnya. PDM Kota Yogyakarta juga selalu mengingatkan kepada kader yang sudah terlibat aktif didalam Pilkada kota Yogyakarta 2017 agar tidak membawa Muhammadiyah secara organisatoris dan mencampurkannya pada agenda-agenda politik yang sedang dijalankan, kader cukup membawa nama pribadi yang berasal dari Muhammadiyah (Wawancara Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Keberpihakan PDM Kota Yogyakarta kepada salah satu calon memang mengarahkan kepada suatu pilihan yang nantinya akan diikuti oleh sebagian besar warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. pilihan tersebut tentunya sesuai dengan kriteria yang diinginkan PDM, seperti kedekatan kultur dengan Muhammadiyah dan memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah. Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi merupakan pasangan calon yang didukung oleh PDM Kota Yogyakarta. Pasangan ini dinilai sangat ideal dan dianggap sejalan dengan visi yang dimiliki PDM Kota Yogyakarta. Haryadi dan Heroe juga merupakan kader Muhammadiyah, diantara mereka pernah aktif dikepengurusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta. Haryadi dan Heroe yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP bahkan memberikan nama koalisinya dengan sebutan “Koalisi Yogyakarta Berkemajuan”. Sebutan koalisi tersebut jelas mempunyai hubungan dengan visi yang dibawa Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yaitu ingin mewujudkan Kota Yogyakarta yang berkemajuan.

Menanggapi tentang keberpihakan PDM Kota Yogyakarta yang mendukung kepada salah satu calon, Ghifari mengatakan hal tersebut adalah upaya PDM ingin mewujudkan Kota Yogyakarta yang berkemajuan. Didalam usahanya PDM mendorong warganya untuk cerdas dalam memilih dan mengarahkan pasangan calon yang lebih dekat dengan Muhammadiyah. Ghifari juga mengatakan :

Di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 kondisi partisipasi masyarakat sebenarnya cenderung menurun, hal itu disebabkan kurang kepercayaannya masyarakat pada kandidat calon yang maju dan dibuktikan dengan angka golput yang tinggi. Masyarakat menilai kebijakan-kebijakan dan program-program yang sebelumnya tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak sedikit juga dari warga Muhammadiyah juga memilih untuk golput. Sikap tersebut menjadi suatu bentuk protes atas kegagalan partai-partai politik dalam memunculkan calon dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (wawancara, Ghifari Yuristhiadi 2018. 09/03/18).

Keadaan tersebut menjadikan Muhammadiyah harus ikut serta dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama warga Muhammadiyah. Sebagai gerakan sosial Muhammadiyah mengingatkan untuk tidak anti kepada politik. Karena bagaimanapun, politik tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memilih pemimpin Muhammadiyah juga mendorong warganya untuk cerdas menggunakan hak pilihnya. Warga Muhammadiyah juga harus mampu melihat serta menganalisis program-program yang digagas oleh kandidat calon yang bertarung. Muhammadiyah

tetap mengarahkan warganya dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, agar Muhammadiyah memiliki kemudahan didalam menjalankan dakwah dan gerakan-gerakannya di Kota Yogyakarta (wawancara, Ghifari Yurishtiadi 2018. 09/03/18).

Rifki selaku Dewan Pembina Pena Muda juga mengatakan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah mendukung penuh pasangan calon nomor urut 2 pada Pilkada 2017. Pena Muda merupakan salah satu tim sukses Haryadi-Heroe. Pena Muda mewadahi sebagian besar anak-anak muda Muhammadiyah yang ingin berkecimpung didunia politik. Pembentukan Pena Muda sendiri didasari atas inisiatif kalangan-kalangan pemuda-pemuda Muhammadiyah yang ingin berpartisipasi dalam menyambut Pilkada 2017. Melihat Muhammadiyah secara organisatoris tidak ingin terlibat didalam politik praktis, jadi dibentuklah Pena Muda sebagai organisasi sayap yang menampung kader-kader Muhammadiyah yang ingin terjun dipolitik praktis (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18).

Pembentukan Pena Muda juga tidak memiliki campur tangan PDM Kota Yogyakarta, sehingga tidak menjadi masalah, karena tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara PDM Kota Yogyakarta dengan Pena Muda. Pena Muda dibentuk hanya saat kemenangan Haryadi-Heroe pada Pilkada 2017, dan tidak terbentuk pada Pilkada sebelum-sebelumnya. Gerakan Pena Muda dilakukan dengan cara mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan simpatisan-simpatisan Muhammadiyah melalui masjid-masjid yang berafiliasi dengan Muhammadiyah untuk mencari dukungan

dalam memenangkan pasangan Haryadi dan Heroe di Pilkada 2017. Pena Muda juga terbuka pada gerakan-gerakan mahasiswa lain seperti HMI, KAMMI, GMNI dan lain-lain yang ingin bergabung dengan Pena Muda. Rifki mengatakan :

Keberpihakan PDM Kota Yogyakarta pada calon nomor dua berpengaruh besar kepada warga Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta, sekitar 90% warga Muhammadiyah memilih pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Pilihan warga Muhammadiyah kepada calon tersebut karena didasari kedekatan ideologi. Pena muda yang menggerakkan massa untuk memenangkan Haryadi-Heroe juga cukup berhasil dalam mencari suara di kalangan pemilih pemula. (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18).

Salah satu Tim Sukses Imam-Fadli yaitu Edi Setiawan juga mengakui hal tersebut, bahwa pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi mampu menarik massa dari kalangan pemuda-pemuda Kota Yogyakarta, terutama Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Edi mengatakan:

Organisasi pemuda yang paling aktif di Kota Yogyakarta adalah Pemuda Muhammadiyah, jadi untuk suara di kalangan pemuda, Imam-Fadli kalah dengan Haryadi-Heroe (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Menurut Edi dukungan penuh PDM Kota Yogyakarta kepada Haryadi-Heroe tidak menjadi masalah, karena Muhammadiyah dalam hal ini PDM Kota Yogyakarta tidak terlibat secara organisatoris dalam proses kemenangan Haryadi-Heroe. Permasalahan yang terjadi sebenarnya soal sikap PDM Kota Yogyakarta yang memberikan dukungan secara terang-terangan kepada calon Haryadi-Heroe, padahal yang sama-sama diketahui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang mengatakan tidak terjun dalam politik praktis,

tetapi pada kenyataannya, perilaku yang diperlihatkan Muhammadiyah pada Pilkada 2017 adalah perilaku berpolitik praktis (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Edi juga mengakui salah satu kekalahan Imam-Fadli pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 adalah dukungan Muhammadiyah kepada pasangan calon Haryadi-Heroe pada detik-detik terakhir pemilihan, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang menyatakan sikap melalui pesan Whatsapp dan disebarakan ke warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk mendukung Haryadi-Heroe dalam kemenangan Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Namun, hal tersebut tidak menjadikan tim sukses dari Imam-Fadli berhenti dalam menggandeng pihak-pihak lain untuk bersama-sama mendukung pasangan calon Imam-fadli memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Melihat beberapa ilustrasi yang digambarkan pada saat Pilkada 2017, bahwa PDM Kota Yogyakarta memang berpihak mendukung kepada salah satu calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, calon tersebut adalah pasangan nomor urut 2 yaitu Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Keberpihakan PDM Kota Yogyakarta memang didasari dengan keputusan Musyda. Didalam keputusan Musyda terdapat rekomendasi internal yang menggambarkan keadaan yang harus dipilih kader dan warga Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Rekomendasi tersebut dianggap sebagai acuan bagi warga Muhammadiyah untuk memilih calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Rekomendasi tersebut juga menuliskan beberapa kriteria calon pilihan PDM

Kota Yogyakarta dan mendorong warga Muhammadiyah dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan rekomendasi itu. Dengan begitu, secara tidak langsung PDM Kota Yogyakarta juga terlibat pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Kemudian keberpihakan PDM tidak mungkin hanya sekedar memberikan dukungan yang itu pun hanya melalui sikap yang tidak mengikat, diantara kedua pihak pasti terdapat komunikasi politik yang membahas tentang strategi dukungan dalam memenangkan kontes Pilkada di Kota Yogyakarta. Agenda komunikasi tersebut ternyata juga dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta kepada calon yang bertarung di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Komunikasi dilakukan biasanya untuk menyatukan visi dan misi yang akan digunakan didalam proses-proses baik selama Pilkada maupun setelah memenangkan Pilkada tersebut.

Rusdianto mengatakan bahwa komunikasi politik Muhammadiyah itu bersifat transformatif yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Peran komunikasi politik Muhammadiyah lebih pada prinsip allocative (pengalokasian) dalam berbagai kelembagaan, seperti partai politik, legislator, dan pemerintahan. Pada prinsipnya pelaku komunikasi yang dimiliki oleh Muhammadiyah harus menganut ideologi, dakwah, citra serta marketing yang sesuai dengan visi dan tujuan Muhammadiyah (Rusdianto, Komunikasi Politik Muhammadiyah, 2016, <https://www.kompasiana.com/13/10/15>).

Didalam agenda-agenda Pilkada Kota Yogyakarta 2017, Edi mengatakan pasangan Imam-Fadli sudah mengusahakan berkomunikasi dengan organisasi-organisasi Islam di Kota Yogyakarta, termasuk Muhammadiyah untuk meminta dukungan pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Namun, respon Muhammadiyah dirasa kurang baik bagi pasangan Imam-Fadli sebab komunikasi dan pertemuannya juga terjadi hanya sekali. Berbeda dengan pasangan Haryadi-Heroe yang berkomunikasi sampai pada tahap koordinasi atau bahkan konsolidasi. Untuk itu Muhammadiyah lebih condong ke pasangan Haryadi-Heroe yang memang mempunyai kedekatan kultur dengan Muhammadiyah juga. Tapi tidak semua warga Muhammadiyah juga berpihak dan memilih pasangan Haryadi-Heroe, ada juga beberapa dari kalangan warga Muhammadiyah yang memilih Imam-Fadli (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Pada kondisi yang yang lain, Rifki selaku tim sukses dari Haryadi-Heroe mengatakan komunikasi yang dibangun dengan PDM Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan agenda silaturahmi yang dilakukan secara resmi. PDM Kota Yogyakarta yang menjadi tuan rumah juga menerima dengan baik kedatangan pasangan Haryadi-Heroe. Dalam agenda silaturahmi di PDM Kota Yogyakarta Pasangan Haryadi-Heroe tidak hanya membicarakan soal dukungan suara, melainkan ingin menjaga tali persaudaraan dan bersosialisasi tentang sosok pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Rifki mengatakan :

Pembahasan soal pemenangan tidak dilakukan saat silaturahmi, tetapi dilakukan di tempat lain dan pada saat agenda yang berbeda. karena pada dasarnya di dalam PDM Kota Yogyakarta sendiri tidak semuanya setuju dan mendukung Haryadi-Heroe, terdapat juga pengurus lain yang memiliki pilihan untuk mendukung Imam-Fadli. (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18)

Akhid juga mengakui hal tersebut, bahwa terdapat komunikasi yang dilakukan PDM dengan pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PDM Kota Yogyakarta menerima dengan baik kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh masing-masing calon. Masing-masing pasangan calon baik Imam-Fadli ataupun Haryadi-Heroe juga sama-sama memperkenalkan program-program yang dibawa untuk maju menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta 2017.

Setelah itu, PDM Kota Yogyakarta mencoba mempelajari dan menganalisis program masing-masing calon. Setelah dipelajari dan dianalisis, PDM merasa selaras dengan program yang dibawa oleh pasangan nomor urut dua (2) yaitu Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Atas dasar hal tersebut, PDM mendukung penuh pasangan Haryadi-Heroe di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Namun, didalam dukungan PDM ke Haryadi-Heoe bukan berarti PDM tidak mendukung Imam-Fadli maju pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, dukungan dari PDM tetap ada tetapi sifatnya tidak mutlak dan mengikat seperti PDM mendukung Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Akhid menilai:

Pasangan Imam-Fadli kurang sesuai dengan PDM Kota Yogyakarta, baik dari segi program maupun dari segi latar belakang itu sendiri, dan apabila Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Imam-Fadli akan

bersinggungan dengan visi Muhammadiyah, juga kebijakan-kebijakan Imam-Fadli ketika menang akan berbenturan dengan tujuan yang ingin dicapai Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18)

Agenda silaturahmi memang dilakukan sekali oleh masing-masing pasangan calon yaitu Imam-Fadli dan Haryadi-Heroe. Namun, bagi pasangan calon yang didukung oleh Muhammadiyah, terdapat beberapa agenda koordinasi kepada PDM Kota Yogyakarta. Koordinasi dilakukan di beberapa tempat seperti, Rumah Dinas PDM Kota Yogyakarta dan Rumah Makan Nyonya Suharti. Agenda komunikasi pasangan calon Haryadi-Heroe juga dilakukan ke Muhammadiyah ditingkat cabang yang dihadiri oleh Pimpinan-pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Agenda tersebut sifatnya hanya sosialisasi dan memperkenalkan visi misi serta program yang dibawa oleh pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Koordinasi yang dilakukan PDM dengan pasangan calon merupakan sebuah konsekuensi, bagaimana PDM Kota Yogyakarta juga berperan dalam memenangkan calon yang didukung. Akan tetapi, koordinasi dilakukan diluar forum resmi atau agenda-agenda Persyarikatan Muhammadiyah, bagaimanapun juga PDM Kota Yogyakarta tetap harus mematuhi aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Koordinasi tersebut juga mengundang beberapa Ortom yang ada di PDM, salah satunya adalah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Didalam koordinasi tersebut juga tidak ada pembahasan yang mengharuskan untuk mendukung calon yang menjadi pilihan Pimpinan

Daerah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk memilih siapapun calon yang sesuai dengan pilihan hati warga Muhammadiyah, akan tetapi ada dorongan untuk memilih calon yang sesuai dengan kultur Muhammadiyah dan mempunyai kedekatan dengan Muhammadiyah (Wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

Koordinasi yang dilakukan PDM Kota Yogyakarta dengan pasangan calon dihadiri sekitar 500 warga Muhammadiyah, Ashad juga mengatakan koordinasi dilakukan tidak dalam konteks membahas Muhammadiyah melainkan dalam konteks menghadapi Pilkada 2017. Kembali lagi Ashad menegaskan bahwa agenda-agenda yang dilaksanakan PDM Kota Yogyakarta dengan pasangan calon adalah sesuai dengan amanah Musyda dan menyampaikan rekomendasi sesuai hasil keputusan Musyda yaitu mendukung pasangan calon yang mempunyai kedekatan kultur dengan Muhammadiyah (wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Komunikasi politik menjadi sangat penting didalam melancarkan agenda-agenda politik di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, PDM Kota Yogyakarta memang menjaga komunikasi dengan kedua kandidat calon yang maju di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Akan tetapi, PDM lebih intens melakukan komunikasi dengan pasangan calon Haryadi-Heroe. Hal itu dilakukan dengan alasan karena pasangan Haryadi-Heroe merupakan pasangan yang telah disepakati untuk didukung pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Beberapa koordinasi juga dilakukan untuk menjaga hubungan PDM Kota Yogyakarta

dengan pasangan calon Haryadi-Heroe agar semakin sinergi didalam melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa PDM Kota Yogyakarta memang berpihak untuk mendukung pasangan calon Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Kemudian, beberapa komunikasi dan koordinasi politik juga dilakukan untuk mencairkan agenda-agenda politik yang akan dilaksanakan kedepan. Dengan begitu, pada aspek netralitas ini, bahwa suatu organisasi harus memiliki sikap tidak secara aktif atau pasif memberikan dukungan kepada salah satu calon tidak dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta. Artinya pada aspek ini PDM dikatakan tidak netral, karena melihat gambaran di atas PDM Kota Yogyakarta baik secara aktif maupun pasif terbukti mendukung salah satu kandidat calon di Pilkada Kota Yogyakarta, kemudian juga melakukan sejumlah komunikasi dan koordinasi politik dengan pasangan calon yaitu Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi.

B. PDM Tidak Menjadi Tim Sukses Salah Satu Kandidat?

Muhammadiyah sebenarnya memiliki pandangan dasar dalam berhubungan dengan politik. Khittah Denpasar 2002 menyebutkan bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan pada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Kemudian Muhammadiyah juga meminta kepada segenap anggota nya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan

tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (usuwah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktivitas politik tersebut juga harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar (Qodir dkk, 2015; 122).

Muhammadiyah juga memiliki sikap politik yang ditegaskan secara gamblang pada Mukhtamar ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang. Pertama, Muhammadiyah dengan seluruh ortom yang dipayunginya tidak berafiliasi dan tidak ada hubungan organisatoris dengan partai politik apapun. Kedua, anggota Muhammadiyah dari berbagai tingkat secara pribadi bebas untuk memasuki atau tidak memasuki ranah politik yang sesuai dengan hati-nuraninya. Hingga sekarang keputusan politik tersebut masih menjadi acuan baku bagi Muhammadiyah (Qodir dkk, 2015: 68).

Keberpihakan PDM Kota Yogyakarta kepada salah satu calon tidak sekedar hanya berkomunikasi dan berkoordinasi, dibalik itu juga terdapat beberapa kader Muhammadiyah yang menjadi tim sukses pemenangan pasangan Haryadi-Heroe. Tim sukses pemenangan yang dibentuk oleh pasangan Haryadi-Heroe yang melibatkan kader Muhammadiyah adalah untuk memudahkan PDM dalam berkomunikasi, karena pada dasarnya PDM tidak mungkin terlibat secara praktis di dalam agenda-agenda politik Pilkada dan tetap menjaga sikapnya untuk tidak terlalu aktif dalam berpolitik pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. PDM tidak melarang kader-kadernya yang ingin terlibat untuk menjadi tim sukses masing-masing pasangan calon baik pasangan Imam-Fadli, maupun Haryadi-Heroe. Karena keterlibatan kader

Muhammadiyah menjadi suatu bentuk partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam meramaikan Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Melihat era yang semakin pragmatis, Ghifari tidak mempermasalahkan jika elit atau kader Muhammadiyah terlibat di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, termasuk kader Pemuda Muhammadiyah sendiri. Ikhtiar yang dilakukannya adalah sebagai wujud mendorong Muhammadiyah untuk bisa berperan nyata didalam pemerintahan. Karena jika tidak seperti itu, Muhammadiyah kemungkinan tidak akan terlalu dianggap signifikan dalam berperan atau berpartisipasi didalam Pilkada 2017. Akan tetapi, Muhammadiyah secara organisatoris harus tetap netral dan Muhammadiyah tidak memilih untuk berpolitik praktis atau dalam konsep Amin Rais dinamakan “High Politik”. Hal itu dilakukan agar senantiasa tetap menjaga pedoman Khittah Muhammadiyah. PDM bisa melakukannya dengan cara soft-politik seperti memberikan arahan kepada warganya untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik untuk memilih pemimpin yang cerdas dan mampu membawa Kota Yogyakarta ke arah yang lebih baik (wawancara Ghifari Yuristiadi 2018. 09/03/18).

Jika Muhammadiyah terjebak didalam politik praktis, akan menjadi suatu pilihan yang tidak sesuai dengan Khittah Muhammadiyah. Ghifari juga mengumpamakan jika organisasi seperti Muhammadiyah yang sudah dibangun sangat lama lalu terjun atau memilih berpolitik praktis, akan menjadi suatu pilihan yang tidak tepat. Disatu sisi memang akan menguntungkan apabila mampu menang didalam kontestasi pemilu, namun

jika kalah Muhammadiyah akan lebih menanggung malu dan berdampak pada kondisi internal yang terpecah belah (wawancara Ghifari Yuristiadi 2018. 09/03/18).

Pengaruh politik PDM Kota Yogyakarta yang cukup besar memang dilatarbelakangi oleh sejarah organisasi Muhammadiyah yang lahir dan berkembang di Kota Yogyakarta. dengan begitu, secara otomatis Muhammadiyah juga memiliki massa yang cukup besar di Kota Yogyakarta. Namun, dengan keadaan seperti itu, Ghifari selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tetap memberikan masukan bahwa PDM Kota Yogyakarta tetap harus bisa menjaga diri untuk tidak terjebak didalam ranah politik praktis apalagi sampai menjual diri untuk politik. Hal itu diperlukan untuk menjaga netralitas politik Muhammadiyah dan menjaga kewibawaan Muhammadiyah. Ghifari juga mengatakan :

PDM Kota Yogyakarta pada Pilkada 2017 mungkin memiliki cara tersendiri dalam menerapkan netralitas politiknya, Jika dikaitkan dengan politik hari ini, Muhammadiyah memang kurang terlihat perannya. akan tetapi bagi saya, Muhammadiyah tidak harus terlibat langsung didalamnya, cukup dengan mewarnai di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (wawancara, Ghifari Yuristiadi 2018. 09/03/18).

Pengaruh Muhammadiyah yang cukup besar juga dimanfaatkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah dalam memainkan peran politiknya. terdapat juga kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang menjadi tim sukses pemenangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi. Ghifari mengatakan terdapat sekitar 6 kader yang menjadi tim sukses pemenangan. Menurutnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan, jika niatnya sebagai pembelajaran

politik bagi diri sendiri. Beberapa kader yang terlibat juga memiliki motivasi pribadi agar bisa masuk didalam pemerintahan Kota Yogyakarta, dan bagi kader yang memiliki motivasi seperti itu, Ghifari selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tetap mengingatkan untuk menjaga kewibawaan sebagai kader Muhammadiyah agar tidak terkesan memintaminta posisi di pemerintahan. Kemudian Ghifari juga menghimbau agar mendahulukan kepentingan dakwah, nilai serta tujuan Muhammadiyah. Ghifari juga mengingatkan untuk tidak membawa atribut yang berkaitan dengan Muhammadiyah saat sedang berada didalam situasi kampanye pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (wawancara, Ghifari Yuristhiadi 2018. 09/03/18).

Kemudian terdapat juga seorang pimpinan dan dari PDM Kota Yogyakarta bahkan seseorang tersebut menjadi ketua tim sukses Haryadi-Heroe dalam kemenangan Pilkada 2017 beliau adalah Ashad Kusuma Jaya. Menurut Rifqi keterlibatan Ashad di dalam tim kemenangan Haryadi-Heroe memang sudah memiliki izin yang mengikat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Karena pada dasarnya PDM tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang berlaku didalam aturan-aturan berpolitik di Muhammadiyah (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18).

Keterlibatan Ashad menjadi tim sukses tidak menjadi permasalahan dan tidak ada larangan di PDM Kota Yogyakarta, keterlibatan tersebut bermaksud agar Muhammadiyah bisa tetap bergerak di Pilkada Kota Yogyakarta, karena dukungan Muhammadiyah yang tidak bisa mengalir cepat, untuk itu

diperlukan kader yang menjadi tim sukses dan menggerakkan kader-kader Muhammadiyah dalam mendukung pasangan calon Haryadi-Heroe. Muhammadiyah memang lemah dalam jumlah suara. Seperti Kraton, potensi kemenangan Muhammadiyah kecil, karena basis di Kraton adalah basis PDIP. Namun pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 cukup mengejutkan, karena Muhammadiyah menang dengan suara yang signifikan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan kader Muhammadiyah di Kraton. Muhsin mengatakan terdapat 2 orang yang diketahui terlibat didalam tim sukses Haryadi-Heroe, namun yang tidak diketahui lebih bergerak secara pribadi masing-masing untuk menempatkan diri dalam memperoleh kantong-kantong suara yang bisa dihasilkan (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18)

Keberadaan pimpinan ataupun kader Muhammadiyah menjadi tim sukses pemenangan Haryadi-Heroe sebenarnya adalah sebuah konsekuensi atas keberpihakan Muhammadiyah kepada calon nomor urut 2. Catatan nya adalah ketika terdapat kader atau pimpinan yang menjadi tim sukses pemenangan, harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh PDM Kota Yogyakarta. Keputusan tersebut yaitu menon-aktifkan sementara Pimpinan atau kader Muhammadiyah yang menduduki posisi di struktural Muhammadiyah, baik di ortom, Pimpinan Cabang, maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan PDM untuk tetap menjaga kaidah organisasi yang ada di Muhammadiyah. Samik mengatakan :

Keterlibatan salah satu pimpinan menjadi tim sukses membuktikan bahwa Muhammadiyah memiliki keseriusan dalam mendukung dan berpihak kepada pasangan calon Haryadi-Heroe. Namun, PDM tetap mengingatkan dan membatasi hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menjadi tim sukses, seperti membawa secara terang-terangan atribut atau bendera Muhammadiyah saat berkampanye, dan membawa nama Muhammadiyah saat mencari dukungan suara (wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

Keterlibatan salah satu pimpinan didalam tim sukses pemenangan sebenarnya untuk mewakili Muhammadiyah dalam berperan dibagian politik dan pemerintahan Kota Yogyakarta. Keterlibatan PDM Kota Yogyakarta juga mempunyai maksud bahwa PDM sedang berupaya dalam menciptakan pemimpin yang baik untuk Kota Yogyakarta, dan bisa bersinergi dengan PDM Kota Yogyakarta. Ketiga belas pimpinan di PDM Kota Yogyakarta memang sepakat untuk mengamanahkan salah satunya menjadi tim sukses didalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pimpinan tersebut yaitu Ashad Kusuma Jaya. Beliau juga menjadi Wakil Ketua di PDM Kota Yogyakarta dan membawahi Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik. Akhid mengatakan :

Pak Ashad memiliki kemampuan keilmuan di Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik, untuk itu dimintai menjadi tim sukses, dan Pak Ashad menerima tawaran menjadi tim sukses pemenangan Haryadi-Heroe, disamping itu, ternyata Pak Ashad juga mempunyai kedekatan dengan pasangan calon nomor urut 2 (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Dengan aktifnya Ashad sebagai salah satu tim sukses pemenangan Haryadi-Heroe, Ashad harus dinonaktifkan sementara didalam kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga

agar PDM Kota Yogyakarta didalam menjalankan tugasnya yaitu berdakwah dan sebagai gerakan sosial tidak tercampur aduk dengan politik. Selain itu juga menghindari konflik-konflik yang bisa saja terjadi di internal PDM Kota Yogyakarta. PDM juga tetap memberikan batasan kepada kader Muhammadiyah yang terlibat didalam pemenangan untuk tidak membawa atribut dan bendera Muhamamdiyah saat sedang kampanye.

Ashad mengatakan keterlibatan dirinya didalam tim sukses sebenarnya adalah keinginan dari pasangan calon Haryadi-Heroe. Dengan diberikannya amanah menjadi tim sukses, Ashad tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan amanahnya Ashad juga tidak akan membawa Organisasi Muhammadiyah (dalam hal ini terlibat dipolitik praktis) melainkan membawa pribadi yang ingin mendukung dan memenangkan Haryadi-Heroe di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Alasan beliau memilih untuk mendukung Haryadi-Heroe karena kedekatannya dengan pasangan tersebut, dan beliau sudah mengetahui track record yang telah dilalui pasangan nomor urut 2 tersebut.

Bagi Ashad keterlibatan kader atau PDM Kota Yogyakarta dalam memenangkan pasangan calon adalah suatu hal yang wajar, karena hal tersebut adalah sebagai bentuk partisipasi aktif Muhamamdiyah dalam berkontribusi bagi pemerintah dan menciptakan pemerintahan Kota Yogyakarta dengan lebih baik. Ashad juga mengatakan:

Beberapa kader memiliki porsi dan ukuran sendiri didalam terlibat di Pilkada, ada yang hanya mendukung melalui doa, ada yang memilih

langsung pasangan calon, ada yang memperkenalkan pasangan calon, dan ada yang masuk didalam tim sukses. Apabila terdapat pengurus Muhammadiyah yang terlibat didalam tim sukses memang harus merelakan jabatan di Muhammadiyah untuk di nonaktifkan sementara, dan perihal tersebut dibuktikan dengan hitam diatas putih untuk bisa berkomitmen dalam menjalankan amanah (wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Jika membaca Nashir (dalam Qodir dkk, 2015; 120) bahwa larangan rangkap jabatan sebenarnya bukan untuk menghalangi warganya dalam berjuang diranah politik, semua dilakukan untuk sama-sama menjaga idealisme, posisi, kebaikan dan peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang non-partisan politik. Selain itu, kader yang berkiprah di dunia politik juga mampu mengoptimalkan perannya dan tidak memikul beban yang berat antara memimpin persyarikatan dan aktif di dunia politik praktis.

Melihat ilustrasi yang terjadi, PDM memang tidak terlibat langsung didalam tim sukses atau tim pemenangan pasangan Haryadi-Heroe. Akan tetapi, keterlibatan melalui kader-kadernya beserta pimpinan yang menjadi tim sukses, seakan PDM memiliki alat penyambung dalam berpolitik di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Jika dikaitkan dengan aspek tidak menjadi tim sukses salah satu kandidat, PDM memang tidak termasuk didalamnya, tetapi ada proses-proses politik yang menjadikan PDM seperti terlibat di dalam tim pemenangan, contoh: karena konsekuensi mendukung Haryadi-Heroe, salah satu pimpinan diwariskan menjadi tim sukses. Kemudian, muncul gerakan-gerakan anak muda Muhammadiyah yang didukung oleh PDM dalam mensukseskan pasangan Haryadi-Heroe di Pilkada Kota

Yogyakarta, gerakan tersebut dinamakan Pena Muda, kemudian mendorong kader-kadernya untuk terlibat aktif didalam mendukung pasangan Haryadi-Heroe di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Dengan begitu, PDM dalam aspek ini tetap dikategorikan tidak netral, karena sejumlah aksi dan aktivitas politik PDM yang sangat terlihat mendukung dan mensukseskan pasangan Haryadi-Heroe untuk meraih kemenangan di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

C. PDM Tidak Memiliki Kepentingan Politik?

Kehidupan politik praktis itu sejatinya memperebutkan jabatan dan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, dan budaya atau perilaku tersebut sangat berbeda dengan karakter organisasi kemasyarakatan yang cenderung bersifat kultural seperti Muhammadiyah. Esensinya dalam politik itu selalu ada transaksi saling mendapatkan. Barang yang didapatkan konkrit yakni jabatan, uang, aset dan pengaruh keperntingan yang lainnya (Qodir dkk, 2015: 131).

Dalam konteks dan persepektif tentang keterlibatan PDM sebagai tim sukses, muncul beberapa pertanyaan, ketika terdapat kader atau pimpinan yang menjadi tim sukses, apakah terdapat tawaran politik didalamnya? Jika iya, tawaran tersebut berupa apa? Sebagai gambaran, menjadi tim sukses bukanlah suatu aktivitas politik tanpa pamrih. Biasanya terdapat kesepakatan atau tawaran politik dari salah satu pihak yang membutuhkan tenaga dan fikirannya. Fenomena tawar-menawar politik ini menjadi kewajaran bagi

pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Seperti dikatakan Laswel (1936) bahwa politik itu “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana” (who gets what, when, and how). Tradisi politik tersebut tidak bisa dihilangkan didalam memaknai politik.

Menurut Thohari (dalam Qodir dkk, 2010: 47) bahwa politik itu berujung pada maksud memperebutkan kekuasaan, untuk meraih hal itu memerlukan perjuangan yang jalannya tidak mulus atau landai-landai saja, setidaknya memerlukan 4M (minds, mass, media, money), bahkan seringkali terjadi kontroversial dalam mendapatkannya. Tentu tidak ada yang gratis didalam politik, tidak ada istilah” makan pisang berkubak”, atau istilah lain “ingin mendapatkan nangka tetapi tidak mau getahnya”. Politik itu perebutan kekuasaan yang mengharuskan peperangan atau memperjuangkan dengan gigih.

Hal ini menggambarkan situasi PDM Kota Yogyakarta yang dimana beberapa kadernya terlibat didalam aktivitas politik menjadi tim sukses, kemudian memungkinkan terdapat tawaran atau kesepakatan politik didalamnya. Namun, Akhid mengatakan bahwa PDM Kota Yogyakarta dalam membantu mendukung pasangan calon karena terdapat kesamaan visi dan tujuan yang dibawa untuk Kota Yogyakarta kedepan. Perkara terdapat kader yang sekarang menjadi staff ahli atau masuk didalam pemerintahan Kota Yogyakarta adalah permohonan dari pasangan calon untuk membantu mewujudkan program-programnya didalam menjalankan Pemerintahan Kota Yogyakarta. Beberapa program Muhammadiyah bahkan dimasukkan, dan

menjadi sinergi dalam memajukan Kota Yogyakarta. Bagaimanapun PDM Kota Yogyakarta mencoba untuk selalu berhati-hati didalam berpolitik, dan tetap menjaga citra organisasi agar tetap baik dimata masyarakat. PDM Kota Yogyakarta juga sebisa mungkin menghindari perihal tawaran-tawaran politik seperti jabatan startegis atau kekuasaan di pemerintahan (Wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

PDM Kota Yogyakarta tidak meminta atau menerima persoalan tawar-menawar politik untuk mendukung pasangan calon Haryadi-Heroe. Samik mengatakan jika terdapat tawaran sekalipun, itu hanya sebatas pasangan calon menjanjikan sesuatu ketika PDM mendukung pasangan calon Haryadi-Heroe. Janji tersebut seperti program dan kebijakan yang akan diselaraskan dengan tujuan dan visi PDM Kota Yogyakarta, agar memudahkan didalam berkomunikasi didalam membangun umat dan memajukan Kota Yogyakarta (wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

Muhammadiyah merupakan organisasi yang mendukung tanpa pamrih, dan Muhammadiyah tidak melakukan tawar-menawar politik dengan pihak yang didukung, karena hal tersebut bukan model gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih menekankan kepada bagaimana nanti ketika pasangan calon yang di dukung menang, untuk supaya mempermudah Muhammadiyah dalam bergerak dan berdakwah di Kota Yogyakarta. Gerakan yang menjadi sasaran Muhammadiyah adalah dibidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat (wawancara, Sugeng Nugroho Hadi 2018. 06/04/18).

PDM Kota Yogyakarta tetap menjaga untuk tidak terlibat didalam tawaran politik atau money politik. Akan tetapi, PDM memiliki sejumlah komitmen secara lisan dengan pasangan calon yang di dukung, yaitu: *Pertama*, mendukung dakwah dan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. *Kedua*, Muhammadiyah dilibatkan didalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Ketiga*, dukungan terhadap pendidikan di Muhammadiyah (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18).

Muhammadiyah secara gerakan akan tetap menjaga kewibawaan, untuk tidak terlibat didalam persoalan tawar-menawar politik. Hal itu dilakukan agar Muhammadiyah tidak terkesan seperti partai politik, yang selalu membagi-bagikan jabatan, atau tawar-menawar jabatan. Muhammadiyah tetap mencitrakan dirinya sebagai organisasi Islam yang ber Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Pihak pasangan calon Haryadi-Heroe juga tidak pernah memberikan tawaran politik kepada PDM Kota Yogyakarta untuk membantu memenangkan pasangan tersebut di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Menurut Rifki agenda silaturahmi pasangan calon dengan PDM adalah membahas persoalan Kota Yogyakarta yang sedang dihadapi saat itu, didalamnya juga diisi dengan diskusi, tidak sedikit juga yang memberikan kritikan agar kedepan Kota Yogyakarta menjadi Kota yang lebih baik. Namun, Rifqi juga membedakan jika konteks yang dibahas diluar forum Muhammadiyah, dan didalamnya tidak membawa organisasi Muhammadiyah. Menurutnya hal tersebut tetap terdapat kesepakatan politik baik pihak pasangan calon maupun

pihak dari PDM yang terlibat didalam tim pemenangan. Jika berbicara tidak ada, adalah sebuah kebohongan, karena bagaimanapun politik adalah kesepakatan masing-masing pihak yang memiliki kepentingan didalamnya (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18).

Kemudian pandangan berbeda dimiliki oleh tim sukses pasangan calon Imam-Fadli, menurut Edi bahwa dukungan yang diberikan PDM Kota Yogyakarta kepada pasangan Haryadi-Heroe bukan tanpa kesepakatan politik, menurutnya dukungan tersebut tetap terdapat kesepakatan politik dari kedua belah pihak. Hal itu dibuktikan dengan salah satu pimpinan yaitu Ashad Kusuma Jaya yang menjadi staff ahli Walikota Haryadi (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Kepentingan-kepentingan Muhammadiyah juga banyak dipenuhi pemerintah Kota Yogyakarta, seperti saat diadakan rapat kerja pemerintah Kota Yogyakarta, Muhammadiyah diundang untuk dimintai pandangan tentang program yang akan dijalankan dan dimintai pendapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu jelas bahwa dukungan yang diberikan Muhammadiyah adalah untuk memudahkan Muhammadiyah dalam mencairkan kepentingan-kepentingan yang diinginkan Muhammadiyah (wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Sebagai pimpinan yang menjadi tim sukses pasangan calon Haryadi-Heroe, Ashad mengatakan bahwa tidak terdapat kesepakatan politik berupa jabatan antara PDM dengan pasangan Haryadi-Heroe. Sejauh Ashad menjadi

tim sukses Haryadi-Heroe, tidak pernah membicarakan perihal jabatan yang akan dia peroleh ketika Haryadi-Heroe menang. Ashad hanya menjalankan amanah sesuai keputusan musyda dan memberikan bantuan tenaga untuk mendukung pasangan yang memang dekat Muhammadiyah. Perihal Ashad sekarang menjadi staff ahli Walikota Kota Yogyakarta adalah pembahasan yang dilakukan setelah Haryadi dan Heroe menang, bukan pembahasan yang dilakukan saat Ashad akan menjadi tim sukses atau saat-saat kampanye sedang berlangsung. Ashad memang diminta untuk membantu Walikota untuk mendesain Kota Yogyakarta kedepan agar Kota Yogyakarta semakin maju dan berkembang (wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Kesepakatan atau tawaran politik memang menjadi perihal yang susah untuk dihilangkan dari budaya politik praktis di Indonesia. Kesepakatan tersebut biasanya berupa jabatan strategis, uang, maupun kepentingan yang lain seperti kebijakan atau program. Di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, PDM Kota Yogyakarta memang tidak menerima atau meminta tawaran politik dari pasangan calon Haryadi-Heroe. Namun, perilaku PDM seperti melakukan kesepakatan politik dengan pasangan calon, seperti misalnya, memasukkan kepentingan-kepentingan PDM didalam mendukung pasangan calon. Kepentingan tersebut bisa berupa program atau kebijakan dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Yogyakarta kedepan. Selain itu, munculnya elit PDM Kota Yogyakarta yaitu Ashad Kusuma Jaya yang menjadi Staff Ahli juga menjadi persoalan dan tanda tanya, apakah terdapat kesepakatan tentang jabatan di dalamnya atau tidak? ada yang menjawab iya, ada juga yang

menjawab tidak. tetapi bagi penulis ada atau tidaknya kesepakatan jabatan tersebut, PDM Kota Yogyakarta tetap melakukan atau memiliki kesepakatan politik dengan pasangan calon Haryadi-Heroe untuk memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Dengan begitu, pada aspek ini PDM juga tidak mencerminkan netralitas nya, karena beberapa hal di atas yang menjadikan PDM terlibat didalam kepentingan-kepentingan politik Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Seperti simbiosis mutualisme, harus saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, baik pihak Haryadi-Heroe maupun pihak PDM Kota Yogyakarta. PDM yang memiliki kepentingan politik harus mampu tersalurkan atau diwujudkan oleh pasangan Haryadi-Heroe, begitu juga sebaliknya, Pasangan Haryadi-Heroe juga meminta dukungan baik suara maupun gagasan-gagasan PDM di dalam memenangkan kontestasi Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Secara resmi PDM memang mengatakan netral di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 karena tidak mengeluarkan surat pernyataan dukungan. Akan tetapi, PDM tetap membangun wacana untuk mengarahkan warganya agar cerdas didalam memilih pemimpin dan mengarahkan untuk mendukung pasangan calon Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi dalam memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (wawancara, Sugeng Nugroho Hadi 2018. 06/04/18)

Kemudian melihat aktivitas politik PDM, banyak kader yang terlibat pada Pilkada Kota Yogyakarta, terdapat juga sejumlah bukti seperti surat edaran

yang menghimbau kader atau warga Muhammadiyah untuk memilih calon yang berasal dari Muhammadiyah. Rifki pun mengatakan bahwa sikap Muhammadiyah secara organisasi memang netral, tetapi secara informal atau tidak resmi sikap Muhammadiyah tidak netral dengan adanya perilaku mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut. Alasan PDM tidak menyatakan sikap secara resmi mendukung pasangan calon adalah PDM tetap menjaga Khittah yang pernah dikumandangkan di Ujung Pandang pada Tahun 1971, bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi ke partai politik manapun, dan Muhammadiyah harus mampu menjaga jarak dengan partai-partai politik (wawancara, Rifki Rifai 2018. 08/03/18).

Jika disimpulkan menggunakan beberapa aspek yang menguji netralitas politik, PDM Kota Yogyakarta tergolong didalam kategori yang tidak netral, karena ketiga aspek diatas tidak diimplementasikan oleh PDM Kota Yogyakarta dalam menerapkan netralitas politiknya. Selain itu, beberapa pandangan diatas juga mengatakan bahwa PDM Kota Yogyakarta memang tidak netral didalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Ashad selaku Wakil Ketua PDM sendiri mengatakan bahwa netralitas itu tidak ada didalam kehidupan manusia, semua punya nilai, dan nilai itu didasarkan oleh pilihan. Jika hidup ini netral maka tidak akan ada nilai didalamnya, sebagai contoh ketika pilihannya antara baik dan buruk, maka kita harus memilih salah satunya. Apakah kita harus memilih kebaikan atau keburukan itu sendiri, dan Muhammadiyah mendorong warganya untuk selalu berpihak dalam kebaikan, karena jika ada keberpihakan didalamnya, berarti ada nilai yang

diperjuangkan oleh Muhammadiyah (wawancara, Ashad Kusuma Jaya 2018. 03/03/18).

Perilaku-perilaku PDM Kota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta memang mencerminkan ketidaknetralannya dalam berpolitik, menurut Edi keberpihakan Muhammadiyah pada pasangan calon nomor urut 2 membuktikan bahwa netralitas yang di persepsikan masyarakat selama ini kurang tepat, walaupun Muhammadiyah mencitrakan secara formal tidak menyatakan mendukung pasangan calon, namun jika melihat kondisi real dilapangan, Muhammadiyah tetaplah terlibat didalam proses selama Pilkada 2017 (Wawancara, Edi Setiawan 2018. 08/03/18).

Berdasarkan dari pengamatan penelitian, dan dari data-data di lapangan baik berupa dokumen, wawancara, serta komunikasi dengan beberapa pihak, terdapat beberapa bentuk netralitas yang dapat menggambarkan PDM Kota Yogyakarta saat menghadapi Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Pertama*, netralitas aktif, aktif secara bahasa diartikan sebagai suatu sikap bereaksi dan beraksi. Dalam konteks ini, maka netralitas aktif diartikan sebagai suatu bentuk sikap tidak berpihak pada salah satu calon, akan tetapi tetap beraksi atau berusaha untuk menggunakan hak pilihnya didalam perihal kepemiluan, kemudian mendorong yang lain untuk tidak golput dalam berdemokrasi.

Kedua, netralitas semu, semu secara bahasa diartikan sebagai suatu wujud yang terlihat seperti asli, akan tetapi sebenarnya tidak asli. Dalam konteks netralitas, artinya netralitas semu adalah suatu sikap yang wujud nya terlihat

tidak mendukung atau berpihak kepada salah satu kandidat, akan tetapi sebenarnya mendukung salah satu kandidat calon didalam proses pemilihan. *Ketiga*, netralitas pasif, pasif secara bahasa adalah suatu sikap yang tidak aktif, menerima saja, dan tidak giat (berusaha), jika dikontekskan maka netralitas pasif adalah suatu sikap yang tidak berpihak kepada siapapun, atau tidak terlibat dalam hal apapun, cenderung diam, atau tidak mau tau tentang politik. Jika diistilahkan oleh Talcott Parson (1951) dalam cirri-ciri masyarakat modern adalah “netralitas efektif”, yaitu suatu sikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan pribadi nya, dan tidak memperdulikan keadaan sekitarnya.

Dari beberapa bentuk netralitas yang telah di deskripsikan di atas, jika dikontekskan pada netralitas yang dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, maka PDM Kota Yogyakarta termasuk di dalam kategori netralitas semu. karena sesuai dengan arti netralitas diatas, bahwa PDM secara formal memang mengatakan netral di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, akan tetapi secara implementasi, PDM tidak menerminkan netralitasnya. seperti mendukung salah satu pasangan calon yaitu Haryadi-Heroe, berkoordinasi dengan pasangan calon, melibatkan pimpinan menjadi timsukses pemenangan, dan memasukkan kepentingan-kepentingan PDM dalam kesepakatan politik dengan pasangan calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

PDM Kota Yogyakarta pada dasarnya berusaha menjaga komitmen untuk netral, meskipun didalam momentum politik praktis seperti Pilkada belum mencerminkan kenetralannya. Namun, Setidaknya PDM Kota Yogyakarta tidak menyatakan sikap secara terang-terangan mendukung pasangan calon Haryadi-Heroe, PDM tetap menggunakan etika politik yang santun, dan tetap menggunakan soft politiknya didalam berpartisipasi pada Pilkada Kota Yogyakarta. Muhsin selaku Ketua PCM Kraton mengatakan netral memang harus diartikan dengan mengambil jarak yang sama, akan tetapi selama ini Muhammadiyah tetap saja gagal didalam menerapkannya, hal itu dikarenakan kader atau elit yang mempunyai kepentingan masing-masing yang membuat mereka harus bermain di politik praktis, dan melibatkan Organisasi Muhammadiyah (wawancara, Muhsin Haryanto 2018. 05/04/18)

Sebenarnya tidak menjadi permasalahan ketika seseorang yang didukung adalah sejalan dengan visi yang sedang Muhammadiyah tempuh. Menurut Samik, ketika visi mampu dilakukan bersama-sama akan memudahkan dalam memajukan dakwah persyarikatan, karena pada dasarnya agama dalam konteks ini Muhammadiyah tidak akan mungkin bisa lepas dari campur tangan politik, dalam kondisi apapun Muhammadiyah pasti akan terlibat, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Jika Muhammadiyah lepas tangan dari persoalan politik, Muhammadiyah tidak akan mengetahui persoalan-persoalan bangsa yang perlu diperbaiki, dan seperti cita-cita K.H Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah harus bisa memberikan kemajuan bagi

bangsa dan negara, serta membangun umat bangsa Indonesia (wawancara, Abd Samik Sandhi 2018. 10/03/18).

Hubungan Muhammadiyah dengan politik memang tidak bisa dipisahkan, hal tersebut dilatarbelakangi sejarah Muhammadiyah yang juga pernah berpolitik praktis didalam membangun bangsa Indonesia. Muhammadiyah juga memiliki pengalaman banyak dibidang politik, dengan segudang pengalaman tersebut Muhammadiyah memutuskan untuk tidak berafiliasi dengan partai politik. Karena kekhawatiran yang begitu tinggi, bahwa politik dapat memecah belah umat dan persatuan di dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga memiliki pengalaman panjang tentang politik, dengan sejarahnya yang pernah berafiliasi ke partai politik dan menjadi bagian partai politik tersebut. Namun bagi Akhid, bahwa keputusan-keputusan bapak pimpinan sebelumnya untuk tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik sangatlah tepat, karena jika Muhammadiyah terpengaruh dan menjadi partai politik, maka kemungkinan keadaan Muhammadiyah sekarang akan terpecah belah. Karena bagi akhid politik adalah sesuatu yang tidak akan melekat abadi. Untuk itu Muhammadiyah harus tetap bisa menjaga komitmen persyarikatan sesuai khittah yang disepakati, yaitu pendirian Muhammadiyah adalah untuk kemaslahatan umat, dan menjadikan politik hanya sebagai bagian di dalam organisasi Muhammadiyah saja (wawancara, Akhid Widi Rahmanto 2018. 08/03/18).

Ketidaknetralan Muhammadiyah didalam momentum politik seperti Pilkada Kota Yogyakarta 2017 adalah bukan berdasarkan bahwa Muhammadiyah berafiliasi dengan partai politik, atau Muhammadiyah mendirikan partai politik untuk memenangkan pasangan kandidat yang sedang bertarung, ketidaknetralan Muhammadiyah disini diartikan sebagai keberpihakan Muhammadiyah dalam berperan memilih pemimpin yang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, karena bagaimanapun Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar di Kota Yogyakarta tetap harus terlibat dan turut ambil bagian dalam memilih pemimpin di Pilkada Kota Yogyakarta, agar kedepan Muhammadiyah dapat berkontribusi dan bersinergi dengan pemimpin Kota Yogyakarta yang baru dalam membangun Kota Yogyakarta ke-arah yang lebih baik dan dapat memajukan persyarikatan Muhammadiyah.